**EVALUASI PENGENDALIAN INTERN ATAS BAGIAN PERSEDIAAN BLANKO ( KK, KTP, AKTA PENCATATAN SIPIL ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN PADANG PARIAMAN**

***INTERNAL CONTROL EVALUATION OF THE AVAILABILITY ( FAMILY CARD, RESIDENT CARD, CIVIL REGISTRASION CERTIFICATE ) TO DEPARTEMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRY PADANG PARIAMAN***

**Hermadila Sari, Tety Chandrayanti**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti,

Jl. Veteran Dalam No. 26 B, Kota Padang, 25113, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengendalian Intern terhadap Persediaan Blangko KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem Pengendalian Intern Mengacu Pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil yang diperoleh mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Blangko KK, KTP dan Akta Pencatatatn Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Terdapat ketidak sesuaian pengendalian Intern atas persediaan blangko KK, KTP, dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan SOP (*Standard Operating Procedure* ), dengan uji tanda yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan n= 15, tanda ( - ) = 6 dan tanda (+)= 9 dengan taraf nyata kesalahan α = 5 %., maka dapat dirumuskan h-hitung= h( 5% : 15 ) dari table lampirang h-hitung = 6 > h-tabel  = 3 HA  ditolak HO  diterima.

**Kata Kunci** : Persediaan, Pengendalian Intern, *Standard Operating Procedure* ( SOP ).

***ABSTRACT***

*This study aims to determine whether the Internal Control of the Supply Blank KK, ID cards and Civil Registration Act at the Office of Population and Civil Pencatatn Padang Pariaman in accordance with Standard Operating Procedure (SOP).*

*The sample used in this study is a Standard Operating Procedure (SOP) Office of Population and Civil Registration.*

*Internal Control System Based On Standard Operating Procedure (SOP) as determined by the Department of Population and Civil Registration Padang Pariaman.*

*Results obtained to know how the implementation of the Internal Control over Blank KK, ID cards and Deed Pencatatatn Civil Padang Pariaman district, are mismatching control Intern on supplies blank KK, ID cards and civil registration at the Department of Population and Civil Registration Padang Pariaman with SOP (Standard Operating procedure), with the sign test conducted by the authors ie with n = 15, the sign (-) = 6 and sign (+) = 9 with a real level of error α = 5%., it can be formulated h-count = h (5% : 15) on the table lampirang h-count = 6> h-table = 3 HA HO rejected accepted.*

***Keywords*** *: Inventory, Internal Control, Standard Operating Procedure (SOP).*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 2012 merupakan salah satu instansi yang dibentuk oleh Negara dibawah Pemerintahan Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 68 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Penduduk.
2. Pencatatan Sipil ( Kematian, Kelahiran dan Perkawinan Non Muslim ).
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangatlah penting bagi penduduk Indonesia terutama pada Kabupaten Padang Pariaman. Dokumen kependudukan yang merupakan produk yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut merupakan hal yang penting bagi penduduk Indonesia, dimana dengan adanya dokumen kependudukan masyarakat Indonesia dapat memperoleh identitas warga Negara.

Dokumen kependudukan yang di dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari hasil pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut diperoleh menggunakan media teknologi dan kertas khusus yang telah disahkan oleh Negara. Media Teknologi dan media lainnya tersebut perlu adanya control internal yang baik agar terlaksanya dengan baik.

Dalam Kamus bahasa Indonesia Pengendalian Internal atau control internal adalah sebagai proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu dan pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur suber daya suatu organisasi. Pengendalian Intern berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan ( *frounf )* dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud ( seperti mesin, persediaan dan lahan ) maupun tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang

Mengenai judul yang diangkat oleh penelis untuk diteliti adalah **Evaluasi Pengendalian Intern Atas Persediaan Blangko (KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.** Dimana telah dijelaskan apa itu pengendalian intern, dan bagaimana Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Disini penulis memiliki penglihatan bagaimana pengendalian intern tas bagian persediaan blangko pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman dalam pemakaian blangko perharinya tidak terkontrol dan bagaimana standar prosedur yang telah ditetapkan untuk pemakaian blangko tersebut penulis merasa tidak sejalan dengan standar tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut sebagai objek untuk diteliti dan dengan judul “ **EVALUASI PENGENDALIAN INTERN ATAS PERSEDIAAN BLANGKO (KK, KTP DAN AKTA PENCATATAN SIPIL) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.**

**Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengendalian intern yang dipergunakan untuk blangko KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pengendalian intern atas persediaan Blangko ( KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil ) sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP)?

**Tujuan Penelitian**

1 Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengendalian intern KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mengetahui apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pengendalian intern atas Persediaan Blangko ( KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil ) sesuai dengan  *Standard Operating Procedure* ( SOP ).

**Manfaat Penelitian**

Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Dapat dipergunakan sebagai pedoman, dan pengukuran kinerja pada bagian persediaan blangko

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui bagaimana pengendalian intern terhadap persediaan blangko bai secara teoritis dan secara praktek.

1. Bagi peneliti lainnya. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman pada penelitian yang akan datang.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Evaluasi**

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran ( appraisal ) , pemberian angka ( Ratting ) dan penilaian ( assessmment ) kata – kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih pasifik evaluasi merupakan bagian dari system managemen perencanaan , organisasi pelaksana , monitoring dan evaluasi.

Menurut kamus bahasa indonesia , kata evaluasi bearti proses penilaiaan . sedangkan evaluasi menurut djaali dan puji ( 2008 : 1 ) dalam halnova liza diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang di evaluasi . mengutip dari ahmad ( 1007 : 133 ) dalam halniva liza evaluasi adalah sebagai proses sistematis untuk menentukan penilaian sesuatu ( ketentuan, kegiatan, keputusan, untuk kerja , proses, orang, objek dll ) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.

**Pengendalian Intern**

Committee of sponsoring organization of the treadway commission ( COSO ) pada tahun 1992 mengeluarkan defenisi tentang pengendalian internal . defenisi (COSO) tentang pengendalian intern sebagai berikut : internal control , affected by entility’s board of directors , management and other personel , designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of pbjectives in the following categories :

1. Effectivenes and afficiency of operatioons
2. Reability of financial reporting
3. Compliance with applicable laws and regulations

Atau terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut : sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris , managemen, dan personil lainnya , yamg dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut peraturan menteri dalam negeri no 4 tahun 2008 , pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadaidalam pencapaian efektifitas , efesien , ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku , dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Menurut peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efesien daan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

**Persediaan**

 Persediaan dalam standar internasional akuntansi sektor publik ( international publik sector accounting standard-IPSAS ) 12 tentang inventories memberikan defenisi persediaan sebagai berikut

* 1. in the form of material or supplies to be consumed in the production process
	2. in the form of material or supplies to be consumed or distributed in the trendering of services
	3. herd for sale or distribution in the ordinary course of operasion
	4. in the process of productioon for sale or distribution

 Di indonesia, defenisi persedian meliputi juga perlengkapan yang diguanakn dalam proses produksi. Hal ini dijelaskan dalam PSAP 5 tentang akuntansi persediaan sebagai berikut :

* 1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah
	2. bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi
	3. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
	4. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Dari pengertian tersebut , kita dapat mengatakan bahwa persediaan dientitas pemerintah mencakup :

* + - 1. barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan ( supplies ) , misalnya barang habis pakai seperti alat tulis ( ATK ) , bahan pembersih, dan barang yang tak habis pakai seperti lampu, gunting, stapler dan lain – lain
			2. barang yang digunakan dalam proses produksi, seperti bareang baku pembuatan alat- alat pertanian , bahan baku pembuatan ktp . kk , akta pencatatan sipil dan lainnya sebagainya.
			3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contohnya karcis, parkir dan bibit tanaman

Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis , seperti cadangan energy, ( misalnya minyak ) , atau tujuan untuk berjaga – jaga seperti cadangan pangan ( misalnya beras ).

**Hipotesis**

 Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka hipotesa yang akan dibuktikan dalam penelitian ini adalah :*“Diduga*, Pengendalian Intern Blangko ( KK, KTP danAkta PencatatanSipil Padang Pariaman sudah sesuaidengan SOP (Standard Operation Prosedure)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

**METODE PENELITIAN**

**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Padang Pariaman bermula dengan nama yang berbeda dari yang saat sekarang ini yakni dinas tenaga kerja kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman , dibentuk pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh GUSNAWATI sebagai kepala dinas pertama dengan lokasi perkantorannya berada dikomplek Perkantoran Bupati Padang Pariaman, sekarang menjadi Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpada Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Padang Pariaman tentang pembentukan susunan organisasi dinas tenaga kerja kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada saat lahirnya Qanun tersebut maka resmilah terbentuk Dinas yang dinamakan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN, dengan dibentuknya nama baru tenaga kerja Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pertama kali dipimpin oleh SUARNI MURAD, SH,M.Hum dengan masa jabatan mulai tahun Juni 2008 sampai Maret 2010 , pada masa jabatannya Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman memiliki 4 Bidang Pelayanan yaitu bagian Sekretariat yaitu bagian Kependudukan dan Mutasi Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Kepengawasan Administrasi Kependudukan , Bidang Pengolahan dan Elektronik Kependudukan . pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkecil Sub Bagian yang ada pada seluruh SKPD yang ada pada Kabupaten Padang Pariaman termasuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri menjadi 3 Bidang yaitu Bidang Pencatatan Sipil, Pencatatan Kematian, Pengesahan Perkawinan, Bidamg Pengolahan dan Pengawasan dan Kependudukan dan juga mengganti Kepala Dinas Baru yang dijabat oleh M.FADHLY,S.AP, MM.

Pada tahun 2012 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh M.FADHLY,S.AP,MM melaksanakan Pelayanan Perekaman e-KTP atas canangan Menteri Dalam Negeri, Pelayanan e-KTP ditempatkan pada Masing-Masing Kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada pelaksanakan e-KTP , Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan Penghargaan Cepat Sukses e-KTP tercepat Nasional Indonesia Bagian Barat mendapatkan juara II dengan diberikan hadiah Mobil Avanza Veloz, selain itu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman juga mendapatkan penghargaan Citra Pelayanan Prima ( CPP ) atas pelayanan yang baik

**Analisis Data**

Setelah data penelitian diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Semua data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, kemudian dianalisa / diolah untuk mencapai akhir penelitian

Dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

* + 1. Metode Deskriptif kualitatif

Metode ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern yang dipergunakan untuk blangko KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan analisa flowchart.

* + 1. Metode Deskriptif Kuantitatif

Dalam metode ini penulis menggunakan Uji Tanda (Sign Test) untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu untuk mengetahui Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pengendalian intern atas persediaan Blangko ( KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil ) sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Metode ini digunakan untuk membahas rumusan masalah yang Kedua analisa Uji Tanda yaitu dengan memberikan tanda Plus ( + ) untuk item yang sesuai dan tanda minus ( - ) pada item yang tidak sesuai.

**Metode Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penulisan ini dengan menggunakan perbandingan nilai uji tanda hitung dengan uji tanda tabel.

Uji tanda hitung yang penulis gunakan adalah nilai h terkecil, sedangkan uji tanda tabel yang penulis gunakan adalah tabel distribusi tanda dengan taraf kesalahan alfa (α) 5%.

Selanjutnya h menyatakan banyak tanda yang terjadi paling sedikit, dimana bilangan h ini dipakai untuk menguji hipotesis :

Ha : Bahwa Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pengendalian intern atas persediaan Blangko ( KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil) sesuai dengan SOP (Standard Operation Prosedure) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ”.

Ho : Bahwa Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman belum melaksanakan Pengendalian Intern atas Blangko ( KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil) tidak sesuai dengan SOP (Standard Operation Prosedure) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ”.

Dengan ketentuan bahwa Ho ditolak apabila h-hitung ≤ h-tabel dengan alfa (α) 5%, dan sebaliknya Ho diterima apabila h-hitung lebih dari h-table (h-hitung > h-tabel).

**HASIL PENELITIAN**

Dari hasil uji tanda Pengendalian Intern yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan tanda yang memberikan h-hitung = 6. Dengan n = 15 dan α =0,05, maka h-hitung = h ( 5% : 15 ) dari tabel lampiran h-hitung = 6 > h-tabel  = 3 HA  ditolak HO  diterima.

Terdapat ketidak sesuaian pengendalian Intern atas persediaan blangko KK, KTP, dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan SOP (*Standard Operating Procedure* ), dengan taraf nyata kesalahan α = 5 %.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Padang Pariaman, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Padang Pariaman dan sistem pengendalian tersebut belum efektif dan tidak sesuai dengan SOP (*Standard operating procedure ).*

Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Intern atas blangko KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dimulai dari Pengendalian Bendahara merekap beberapa kebutuhan blangko untuk tahun ini dan memberikan laporan kepada kasubak perencanaan, kasubak perencanaan bartugas membua daftar kebutuhan berapa blangko yang dibutuhkan untuk tahun ini, kasi pelayanan bertugas untuk membuat daftar kebutuhan blangko perharinya, kasi pelayanan memperoleh blangko dengan mengisi bukkti pengambilan dari gudang yang disediakan oleh bendahara barang, kasi pelayanan bertugas mendistribusikan blangko kebagian pelayanan ( forn office ), petugas pelayanan bertugas untuk membuat rekap kontrok perharinya dan melaporkan pada Kasi Pelayanan Kependudukan, Kasi Pelayanan bertugas membuat laporan realisasi jumlah blangko perharinya dan memberikan kepada Bendahara Barang dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Terdapat ketidak sesuaian pengendalian Intern atas persediaan blangko KK, KTP, dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dengan SOP (*Standard Operating Procedure* ), dengan uji tanda yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan n= 15, tanda ( - ) = 6 dan tanda (+)= 9 dengan taraf nyata kesalahan α = 5 %., maka dapat dirumuskan h-hitung= h( 5% : 15 ) dari table lampirang h-hitung = 6 > h-tabel  = 3 HA  ditolak HO  diterima.

**DAFTAR PUSTAKA**

Baridwan, 2008. dalam *Intermediate Accounting*

Baridwan, 2004 Auditing dan Jasa Assurance, Jakarta : Erlangga

James, 2007 , Auditing petunjuk pemeriksaan akuntan public ( ETAP ), Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi 2007, Sistem perancangan dan Pengendalian Manajemen, Jakarta : Salemba Empat.

Soemarso, 2005, Akuntansi suatu Pengantar. Jilid 1, Edisi Indonesia, Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia.

Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) Nomor 16 Tahun 2009, Audit Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat.

T.M Tuanakota, 2009. Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan.

Zaki, 2008. Auditing suatu Pendekatan Komprehensif Per Pos & Per Siklus, Edisi ke 2. Salemba Empat : Jakarta.

Dixion, W. J dan Massey, 1989 Statistik Dasar

Eka Rachmawanto “ Evaluasi Pengendalian Intern pada sistem persediaan di PG, Watoe Toelis Kriam Sidiarjo” ( 2007 )

Ruzanna Amanina, Evaluasi terhadap sistem pengendalian Intern kepada proses pemberian kredit mikro “, 2011.

[www.iaiglobal.or.id/prinsip\_akuntansi/standar](http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/standar) Diakses 20 Desember 2015.

<http://iipsja.blogspot.com/2009/04/contoh-kasus-audit>. Diakses 05 Januari 2016.